

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu bentuk dari rasa empati manusia adalah dengan cara tolong-menolong. Hal ini terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Terbentuknya organisasi nirlaba seperti yayasan merupakan wujud dari masyarakat dalam membantu sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Yayasan merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari beberapa macam sumber. Dilihat dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan juga memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan.

Saat ini lembaga nirlaba berbentuk yayasan bergerak dalam berbagai bidang kegiatan dan pelayanan. Ruang lingkup dalam yayasan juga semakin luas sehingga jumlah yayasan saat ini dikategorikan sebagai raksasa dalam dunia bisnis. Hal tersebut terjadi karena adanya peran yayasan yang semakin penting sebagai tempat untuk mewujudkan keinginan sosial, kemanusiaan, pendidikan dan keagamaan.

Perkembangan yayasan di Indonesia cukup cepat tercatat ada ratusan yayasan yang berdiri di Indonesia namun hingga akhir tahun 2013 hanya terdapat 366 yayasan di Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai yayasan yang berbadan hukum dan berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. (Sana Sholihah 2014)

Sama halnya seperti organisasi nirlaba pada umumnya yayasan juga memiliki dana penerimaan dan pengeluaran yang cukup besar sehingga harus dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan nirlaba pun telah diatur berdasarkan standar akuntansi keuangan agar terdapat keseragaman, maka dari itu Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Menurut **Sukrisno Agoes** dan **Jan Hoesada** (2012:94) Tujuan utama laporan keuangan yayasan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi yayasan. Pihak pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:

1. Jasa yang diberikan oleh yayasan dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut;
2. Cara mengelola dan melaksanakan tanggung jawab serta aspek lain dari kinerja yayasan.

Laporan keuangan yayasan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi laporan keuangan lain. Seperti halnya peran aset didalam laporan posisi keuangan, aset sangat berpengaruh penting bagi kelangsungan hidup yayasan. Seperti aset tetap, persentase aset tetap didalam yayasan juga sangat memegang peranan penting. Aset tetap merupakan aset yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dan properti investasi merupakan komponen dari aset tidak lancar. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan) sebagai besar perusahaan. (Dwi Martani, dkk 2012:270).

Meskipun sudah dikeluarkan peraturan mengenai standar pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba, namun pada kenyataannya masih banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak- pihak pengelola sekolah dalam mengelola aset disekolah, seperti beberapa kasus yang terjadi pada beberapa sekolah berikut ini:

1. Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) Dasar Menengah (Dasmen) PGRI Jawa Timur (Jatim) mengakui ada permasalahan yang serius di tubuh SMK PGRI 3 Malang. Selain ada pihak lain yang mengklaim sebagai pendiri dan memiliki seluruh aset yang ada di sekolah itu, namun mereka juga mencurigai ada penyelewengan keuangan sekolah. Hal ini dikatakan Sekretaris PPLP Dasmen PGRI Jatim, Sugiyanto. Ada dugaan penyelewengan yang

ditemukan sehingga hal ini harus segera dilakukan langkah tegas. Sekolah yang sudah berdiri selama 26 tahun, ternyata tidak memiliki aset apa-apa. Di dalam PPLP Dasmien PGRI, menurut beliau kekayaan yang diperoleh sekolah, seharusnya adalah untuk sekolah bukan untuk yayasan. PPLP Dasmien PGRI sendiri saja, hanyalah sebagai payung, pembina atau legalitasnya. Pihaknya mulai merasakan ada kejanggalan di tubuh SMK PGRI 3 sejak dua tahun lalu, saat muncul surat pengajuan alih kelola yang dilayangkan kepada PPLP Dasmien PGRI Jatim. Akibat dari kasus ini kegiatan sekolah terganggu dengan adanya permasalahan ini. Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan SMK PGRI 3 Malang terancam. Sebab, 12 dosen Polinema yang mengaku sebagai pendiri sekolah itu, siap memerkarakan dan mengambil kembali gedung yang merupakan hak milik mereka. Bahkan, akibat pengusiran atau somasi yang dilayangkan PPLP Dasmien PGRI Jatim, para pendiri ini langsung meminta kepada SMK PGRI 3 Malang untuk pindah (Sumber:Malang Post,1 Maret 2014)

2. Kasus Kepala Sekolah SMPN 2 Jabung, Imam Sahroni diduga telah menggandakan anggaran operasional sekolah. Modusnya, Imam disinyalir mengganti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dipakai dengan dana iuran dari Komite Sekolah. Jurus yang digunakan Imam Sahroni tentu saja mencekik para wali murid SMPN 2 Jabung. Pasalnya, sejak tahun 2009, muncul kebijakan bahwa iuran wali murid naik dari Rp 1.500 ke Rp 15 ribu/bulan. Kenaikan iuran itu diberlakukan guna pengadaan 12 unit komputer untuk ekstrakurikuler siswa. Bukti adanya kenaikan iuran itu tertuang dalam surat pemberitahuan nomor 015/KS SMPN 2/XII/2009. Ada empat poin dalam pemberitahuan itu. Pertama kenaikan iuran dilakukan untuk menutup RAPBS 2009/2010 sebesar Rp 69,660 juta. Paling lambat wali murid membayar tanggal 10 setiap bulan. Kenaikan iuran itu akan berdampak pada poin kedua, yakni siswa tidak dibebankan biaya internet. Poin tiga sekolah segera menambah komputer untuk siswa menjadi 12 unit dan keempat sekolah memasang instalasi speedy baru dan hotspot yang unlimited. Namun baru dua bulan, ternyata 12 unit komputer disita rekanan lantaran telat membayar

angsuran selama tiga bulan. Ketua Komite SMPN 2 Jabung Cahyo Widodo saat ditemui di sekolah mengatakan, dia sudah gerah dengan ulah sang kasek. Setelah membuka catatan keuangan Komite Sekolah, Cahyo mendapati sejumlah dana operasional sekolah yang ternyata juga ada dalam data pokok statistik sekolah dan dana BOS itu. Dia mengambil kesimpulan bahwa Kasek tetap menulis laporan penggunaan dana BOS, padahal sehari-hari operasional sekolah memakai uang komite. “Ini buktinya, seperti honor untuk GTT. Dalam rincian keuangan Komite, pengeluaran itu juga ada. Tapi ternyata dalam data pokok statistik sekolah dan dana BOS juga ada. Artinya ini ada yang ganda,” urainya. “Sejak awal, Kasek memang tidak transparan. Kita Komite tidak pernah dilibatkan. Bahkan sekolah juga tidak ada RAPBS, Tak hanya memakai dana BKM, saat itu Sahroni rupanya juga memungut biaya PSB diluar ketentuan Dinas Pendidikan Pemkab Malang. Biaya PSB yang ditetapkan Dinas Pendidikan adalah Rp 8 ribu, namun oleh Sahroni dipungut hingga Rp 12 ribu. Dia bahkan juga mengambil biaya pengambilan STTB Rp 8 ribu padahal seharusnya gratis. (Sumber: Malang Post, 4 januari 2011)

Penerapan PSAK No.45 yang masih kurang baik pada yayasan-yayasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pengawasan dari aset yang ada disekolah, sehingga memudahkan bagi para pelaku untuk mengambil aset yang terdapat disekolah tersebut. Kemudian keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menilai dan mencatat harga perolehan aset tetap sehingga sering sekali terjadi kerugian dalam hal menilai aset tetap tersebut. Selanjutnya karena kurangnya kesadaran pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan serta lemahnya pengendalian manajemen dalam mengelola aset yayasan yang seharusnya dapat menjadikan yayasan berkembang dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Fenomena penerapan PSAK No.45 yang kurang baik bukan hanya pada yayasan dengan ukuran yang relatif kecil tetapi juga yayasan yang sedang berkembang dengan cakupan pelayanan yang relatif lebih luas. Organisasi nirlaba yang dalam hal ini adalah yayasan yang bergerak dibidang pendidikan yaitu sekolah diharuskan dapat mengelola asetnya secara profesional. Adanya persaingan yang ketat diikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menjadikan sekolah khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk dapat meningkatkan kualitas sekolahnya baik dari segi pendidikan maupun dari segi manajemen. Hal ini ditujukan agar apabila siswa yang setelah lulus SMA tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya memiliki bekal dan kualitas tinggi untuk dapat masuk ke perguruan tinggi pilihan. Oleh sebab itu, tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta sistem, prosedur, kebijakan dan struktur organisasi yang baik untuk memperjelas ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota organisasi.

Berdasarkan kejadian kerusakan aset tetap disekolah, kehilangan aset tetap yang sering terjadi akibat dari kecurangan dari pihak pengelola sekolah serta jarang nya pengaplikasian laporan keuangan yang mengacu pada Penerapan PSAK No. 45 membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang **“Pengaruh Penerapan PSAK No.45 Terhadap Kinerja Yayasan” (Studi pada Yayasan SMA Pasundan di Wilayah kota Bandung).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan PSAK No.45 di SMA Pasundan.
2. Bagaimana Kinerja Yayasan di SMA Pasundan.
3. Berapa besar pengaruh penerapan PSAK No.45 terhadap kinerja yayasan di SMA Pasundan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan PSAK No. 45 di SMA Pasundan.
2. Untuk mengetahui Kinerja Yayasan di SMA Pasundan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan PSAK No.45 terhadap Kinerja Yayasan di SMA Pasundan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Dapat memperluas konsep maupun teori yang mendukung tentang perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi, terutama yang berkaitan dengan pengaruh penerapan PSAK No. 45 terhadap kinerja Yayasan SMA Pasundan di wilayah kota Bandung
2. Sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran dalam menunjang ilmu akuntansi khususnya di bidang pemeriksaan keuangan dan khususnya pada PSAK No.45
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi atau wacana ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis :

Dapat mengembangkan wawasan dan pemahaman serta perbandingan antara teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan praktek yang sebenarnya, khususnya dalam ilmu akuntansi mengenai pengaruh penerapan PSAK No. 45 terhadap kinerja yayasan.

2. Bagi perusahaan :

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan mengenai pengaruh penerapan PSAK No. 45 terhadap kinerja yayasan di SMA Pasundan di Wilayah Kota Bandung serta dapat membuat suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi pihak lain :

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan untuk membuat penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman terbatas mengenai pengaruh penerapan PSAK No.45 terhadap kinerja yayasan di SMA Pasundan di Wilayah Kota Bandung.

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh SMA Pasundan di Wilayah Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sesuai dengan judul skripsi ini, Kuesioner diberikan kepada para pengambil keputusan manajemen dan karyawan pada SMA Pasundan di Wilayah Kota Bandung.